HARIAN UMUM
NusaBali

Setelah Buleleng Raih WTP Tiga Kali Beruntun

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng untuk ketiga kalinya secara beruntun meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP tersebut masing-masing atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016. Pasca raih WTP ketiga, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berharap ada kenaikan dana intensifikasi daerah atau dana Rakca sebagai reward, seperti tahun

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (kiri) terima LHP berisi WTP dari Ketua BKP Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo, di Denpasar, Jumat (2/6).

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

lalu.

Opini WTP untuk Pemkab Buleleng diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, kepada Bupati Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6) pagi. Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan predikat WTP untuk Pemkab Badung, Pemkab Tabanan, Pemkab Jembrana, Pemkab Bangli, Pemkab Klungkung, Pemkab Karangasem, dan Pemkot Denpasar.

Bupati Agus Suradnyana menyebutkan, secara kualitas, opini WTP yang diraih Pemkab Buleleng kali ini lebih baik dibanding tahun lalu. Pasalnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2016 oleh BPK kali ini tidak berisi kesalahan administrasi. Yang ada hanya berisi catatan tentang perbaikan administrasi. "Secara kualitas, tahun ini lebih baik. Hanya ada delapan catatan perbaikan, bukan kesalahan," tandas Bupati Agus Suradnyana di Singaraja, Minggu (4/6).

Agus Suradnyana berharap dengan torehan hasil WTP terbaik kali ini, pemerintah pusat akan memberikan reward berupa dana intensifikasi daerah kepada Buleleng yang lebih besar dibanding setahun lalu. Kendati tidak serta merta acuannya opini WTP, namun secara perencanaan, ketepatan waktu penyerahan APBD, pertanggungjawaban, dan kinerja aparatur sudah sesuai dengan ketentuan dan sangat mendukung.

Setahun lalu, Pemkab Buleleng menerima dana intensifikasi daerah sebesar Rp 55 miliar dari pusat, setelah menduduki peringkat 10 besar se-Indonesia dalam pengelolan keuangan terbaik. "Saya berharap kita bisa mendapatkan penghargaan dana raksa atau dana intensifikasi daerah ini," kata Agus Suradnyana.

"Kalau bisa lima besar, kita bisa dapat Rp 65 miliar. Tentu dana ini nanti bisa menambah kemampuan fiscal daerah, untuk mempercepat pembangunan di Buleleng," lanjut politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng 2015-2020 ini.

Menurut Agus Suradnyana, capaian hasil opini WTP dalam pengelolaan keuangan tidak bisa lepas dari hasil kerja keras bersama aparatur sipil negara (ASN). Mereka telah bekerja dengan maksimal. "Saya berterimakasih kepada rekan-rekan aparatur di Pemkab Buleleng, karena sudah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan dengan opini WTP ini, kita bisa kembali mendapat dana intensifikasi daerah dari pemerintah pusat," papar Bupati Buleleng yang mantan Ketua Komisi III DPRD Bali (membidangi pembangunan, infrastruktur, lingkungan) tiga kali periode ini.

Untuk diketahui, berkat pengelolaan keuangan yang taat prosedur dan aturan, Pemkab Buleleng setahun lalu meraih Anugerah Dana Raksa dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 55 miliar. Anugerah Dana Raksa tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Bupati Buleleng yang dijabat Plt I Made Gunaja di Istana Negara Jakarta, 7 Desember 2016.

Anugerah Dana Raksa diberaikan karena Buleleng dinilai profesional dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Anugerah Dana Raksa ini juga merupakan penghargaan tertinggi tingkat nasional. Karena penghargaan ini diberikan kepada 38 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, termasuk di dalamnya Pemkab Buleleng dan Pemkab Jembrana. @ k19

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : 1 dan 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 3 M Pembangunan Pura di Desa Adat Ambengan

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 3 miliar kepada panitia pembangunan Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Sabtu (3/6), di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan. Penyerahan hibah ini disaksikan masyarakat sebagai bukti dana hibah Pemkab Badung sudah cair. Bupati secara simbolis juga menyerahkan punia sebesar Rp 50 juta untuk upakara/aci piodalan di Pura Desa lan Puseh, yang telah dilaksanakan sebulan lalu.

Acara tersebut dihadiri anggota DPRD IB Sunartha bersama I Nyoman Satria dan I Made Ponda Wirawan, Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta, dari Dinas Kebudayaan, Sekcam Abiansemal beserta Tripika Kecamatan, Perbekel Ayunan I Made Sugatra, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura.

Bendesa Adat Ambengan I Made Ladra, atas nama krama Desa Adat Ambengan menyampaikan terima kasih atas bantuan hibah yang diberikan Bupati dan Pemkab serta DPRD Badung untuk pembangunan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Ambengan. Ditambahkan, dana Rp 3 miliar ini untuk pembangunan Pura Desa lan Puseh. Pembangunan pura direncanakan selesai per 31 Desember 2017. Krama Desa Adat Ambengan yang berjumlah 58 ayahan arep, dan 156 KK nanti pada 20 September juga akan melaksanakan upacara nyekah massal untuk pertama kalinya. Untuk itu dia mohon bantuan dari Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta berkomitmen membantu pembangunan di desa adat termasuk kegiatan lainnya. Diharapkan di pura khayangan tiga, krama sudah melaksanakan tri mandala, ada utama mandala, madya mandala dan nista mandala yang dilengkapi dapur dan toilet.

Bupati akan mengambil kebijakan mulai tahun 2018, pemangku kahyangan tiga akan diberi gaji. Untuk meringankan beban masyarakat desa adat, pemkab juga sudah mengambil kebijakan memberikan dana punia untuk upakara/aci setiap piodalan di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat, termasuk di pura Paibon. Khusus di Desa Adat Ambengan, tidak hanya sebatas ini memberikan bantuan, namun Bupati siap akan mendukung segala pembangunan di Desa Adat Ambengan termasuk rencana nyekah masal.

Mengenai penyerahan hibah ini, Bupati mengatakan, hibah sudah melalui mekanisme dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana hibah sebelumnya sudah masuk ke rekening masyarakat penerima. Dan penyerahan dana ini merupakan penyerahan secara simbolis sebagai bukti kepada masyarakat telah mendapat bantuan, selanjutnya dalam pelaksanaannya nanti masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol penggunaan dana tersebut.

"Pencairan dana hibah ini sudah berproses mulai dari KUA dan PPAS, rancangan APBD, kesepakatan dengan DPRD, melakukan verifikasi, penandatanganan NPHD dan panitia sudah menerima dana di rekening di BPD. Dan secara simbolis panitia menarik uang ini untuk bukti kepada masyarakat bahwa dana ini sudah cair. Nanti panitia menarik sesuai peruntukan pembangunan," tegasnya. @asa

● IST

BUPATI Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah Rp 3 miliar pembangunan pura kepada krama Desa Adat Ambengan, Sabtu (3/6),di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan, Kecamatan Abiansemal.

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 3 M Pembangunan Pura di Desa Adat Ambengan

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 3 miliar kepada panitia pembangunan Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Sabtu (3/6), di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan. Penyerahan hibah ini disaksikan masyarakat sebagai bukti dana hibah Pemkab Badung sudah cair. Bupati secara simbolis juga menyerahkan punia sebesar Rp 50 juta untuk upakara/aci piodalan di Pura Desa lan Puseh, yang telah dilaksanakan sebulan lalu.

Acara tersebut dihadiri anggota DPRD IB Sunartha bersama I Nyoman Satria dan I Made Ponda Wirawan, Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta, dari Dinas Kebudayaan, Sekcam Abiansemal beserta Tripika Kecamatan, Perbekel Ayunan I Made Sugatra, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura.

Bendesa Adat Ambengan I Made Ladra, atas nama krama Desa Adat Ambengan menyampaikan terima kasih atas bantuan hibah yang diberikan Bupati dan Pemkab serta DPRD Badung untuk pembangunan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Ambengan. Ditambahkan, dana Rp 3 miliar ini untuk pembangunan Pura Desa lan Puseh. Pembangunan pura direncanakan selesai per 31 Desember 2017. Krama Desa Adat Ambengan yang berjumlah 58 ayahan arep, dan 156 KK nanti pada 20 September juga akan melaksanakan upacara nyekah massal untuk pertama kalinya. Untuk itu dia mohon bantuan dari Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta berkomitmen membantu pembangunan di desa adat termasuk kegiatan lainnya. Diharapkan di pura khayangan tiga, krama sudah melaksanakan tri mandala, ada utama mandala, madya mandala dan nista mandala yang dilengkapi dapur dan toilet.

Bupati akan mengambil kebijakan mulai tahun 2018, pemangku kahyangan tiga akan diberi gaji. Untuk meringankan beban masyarakat desa adat, pemkab juga sudah mengambil kebijakan memberikan dana punia untuk upakara/aci setiap piodalan di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat, termasuk di pura Paibon. Khusus di Desa Adat Ambengan, tidak hanya sebatas ini memberikan bantuan, namun Bupati siap akan mendukung segala pembangunan di Desa Adat Ambengan termasuk rencana nyekah masal.

Mengenai penyerahan hibah ini, Bupati mengatakan, hibah sudah melalui mekanisme dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana hibah sebelumnya sudah masuk ke rekening masyarakat penerima. Dan penyerahan dana ini merupakan penyerahan secara simbolis sebagai bukti kepada masyarakat telah mendapat bantuan, selanjutnya dalam pelaksanaannya nanti masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol penggunaan dana tersebut.

"Pencairan dana hibah ini sudah berproses mulai dari KUA dan PPAS, rancangan APBD, kesepakatan dengan DPRD, melakukan verifikasi, penandatanganan NPHD dan panitia sudah menerima dana di rekening di BPD. Dan secara simbolis panitia menarik uang ini untuk bukti kepada masyarakat bahwa dana ini sudah cair. Nanti panitia menarik sesuai peruntukan pembangunan," tegasnya. **@asa**

● IST

BUPATI Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah Rp 3 miliar pembangunan pura kepada krama Desa Adat Ambengan, Sabtu (3/6),di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan, Kecamatan Abiansemal.

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

Karangasem Pertahankan Opini WTP

• IST

BUPATI Karangasem IGA Mas Sumatri (kiri) menerima piagam opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (2/6).

PEMERINTAH Kabupaten Karangasem berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Piagam opini WTP itu diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, diterima Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6) pagi.

Bupati Mas Sumatri usai menerima penghargaan, mengatakan, opini WTP Pemkab Karangasem ini merupakan kali kedua yang diperoleh di masa kepemimpinannya.

"Ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan bagi daerah Karangasem karena mampu mempertahankan penghargaan dari BPK RI ini," ujarnya.

Bupati Mas Sumatri menegaskan dengan diperolehnya penghargaan ini, wajib bagi Kabupaten Karangasem untuk terus mempertahankannya.

"Dengan bekerja tetap berpegang teguh pada peraturan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bermartabat, niscaya penghargaan ini bisa kami pertahankan terus," tandasnya.

Bupati Mas Sumatri menambahkan, opini itu diperoleh atas komitmen dan kerja keras jajaran Pemkab Karangasem dalam mengambil langkah-langkah serta upaya konkrit perbaikan dalam meningkatkan kualitas kerja, terkait penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Mas Sumatri berterimakasih kepada semua OPD, karena atas jerih payahnya maka laporan keuangan Pemkab Karangasem tetap raih opini WTP.

"Jangan sampai kita terlena dengan prestasi ini. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai tim kerja Pemkab Karangasem untuk bekerja lebih keras lagi, karena mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dari pada memperolehnya," tegasnya. @

Edisi : Senin, 5 Juni 2017
Hal : B

HARIAN UMUM
NusaBali

Karangasem Pertahankan Opini WTP

● IST

BUPATI Karangasem IGA Mas Sumatri (kiri) menerima piagam opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (2/6).

PEMERINTAH Kabupaten Karangasem berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Piagam opini WTP itu diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, diterima Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6) pagi.

Bupati Mas Sumatri usai menerima penghargaan, mengatakan, opini WTP Pemkab Karangasem ini merupakan kali kedua yang diperoleh di masa kepemimpinannya.

"Ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan bagi daerah Karangasem karena mampu mempertahankan penghargaan dari BPK RI ini," ujarnya.

Bupati Mas Sumatri menegaskan dengan diperolehnya penghargaan ini, wajib bagi Kabupaten Karangasem untuk terus mempertahankannya.

"Dengan bekerja tetap berpegang teguh pada peraturan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bermartabat, niscaya penghargaan ini bisa kami pertahankan terus," tandasnya.

Bupati Mas Sumatri menambahkan, opini itu diperoleh atas komitmen dan kerja keras jajaran Pemkab Karangasem dalam mengambil langkah-langkah serta upaya konkrit perbaikan dalam meningkatkan kualitas kerja, terkait penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Mas Sumatri berterimakasih kepada semua OPD, karena atas jerih payahnya maka laporan keuangan Pemkab Karangasem tetap raih opini WTP.

"Jangan sampai kita terlena dengan prestasi ini. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai tim kerja Pemkab Karangasem untuk bekerja lebih keras lagi, karena mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dari pada memperolehnya," tegasnya. @

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : B

HARIAN UMUM
NusaBali

Klungkung Raih WTP Dua Kali Berturut-turut

SEMARAPURA- Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali. WTP kali ini merupakan raihan yang kedua kalinya secara berturut turut sejak tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Ida Ayu Made Gayatri serta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Bali, di Aula Kantor BPK, Denpasar, Jumat (2/6).

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho dalam kesempatannya mengatakan sesuai pasal 20 UU No. 15 tahun 2014 dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, maka BPK mengharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ujarnya.

IST

Membanggakan: Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Ida Ayu Made Gayatri serta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Bali, di Aula Kantor BPK, Denpasar, Jumat (2/6).

Raihan cukup membanggakan bagi Provinsi Bali pada acara tersebut. Sebab seluruh kabupaten/kota se-Bali memperoleh opini WTP yang sama. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam kesempatannya menyampaikan rasa banggannya atas capaian itu. WTP yang telah diraih secara berturut turut menandakan integritas, kredibilitas dan akuntabilitas kerja telah meningkat dan semakin membaik. "Atas penghargaan ini, saya berharap akan semakin memacu seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk bekerja yang lebih baik sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku, serta menindaklanjuti beberapa catatan yang direkomendasikan oleh BPK," tandasnya. **(adv/ayu)**

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : 18

HARIAN UMUM NusaBali

Pemkab Jembrana Sukses Raih WTP Tiga Kali Beruntun

● IST

Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana menerima piagam opini WTP dari Kepala BPK Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho di Gedung BPK Perwakilan Bali, Denpasar, Jumat (2/6).

NEGARA, NusaBali

Pemkab Jembrana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali pada tahun 2017. Ini merupakan opini WTP tiga kali berturut-turut yang dibukukan duet kepemimpinan Bupati I Putu Artha dan Wabup Made Kembang Hartawan. Piagam WTP diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati I Putu Artha yang didampingi Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana di Gedung BPK Perwakilan Bali, Denpasar, Jumat (2/6).

Menurut Kepala BPK Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2016 semua kabupaten/kota di Bali adalah WTP. "Ini sekaligus menandakan seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali laporan keuangan tahun 2016 seluruhnya WTP," kata Yulindra.

Sementara Bupati Artha berterima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali yang telah bersedia memberikan koreksi dalam kewajaran penyajian laporan keuangan. Bupati Artha yang didampingi Sekda Jembrana Made Sudiada mengaku sangat bersyukur atas raihan WTP ketiga kali untuk Jembrana ini. Apalagi meraih opini WTP merupakan cita-cita dan idaman setiap daerah. "Raihan WTP ini adalah berkat kerja keras seluruh komponen masyarakat Jembrana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pejabat hingga ke tingkatan terbawah di Pemkab Jembrana. Legislatif juga sudah melakukan pengawasan terhadap Pemkab Jembrana," ujar Bupati Artha. **@ode**

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Klungkung Raih WTP Dua Kali Berturut-turut

SEMARAPURA- Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali. WTP kali ini merupakan raihan yang kedua kalinya secara berturut turut sejak tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Ida Ayu Made Gayatri serta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Bali, di Aula Kantor BPK, Denpasar, Jumat (2/6).

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho dalam kesempatannya mengatakan sesuai pasal 20 UU No. 15 tahun 2014 dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, maka BPK mengharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ujarnya.

IST

Membanggakan: Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DPRD Klungkung, Ida Ayu Made Gayatri serta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Bali, di Aula Kantor BPK, Denpasar, Jumat (2/6).

Raihan cukup membanggakan bagi Provinsi Bali pada acara tersebut. Sebab seluruh kabupaten/kota se-Bali memperoleh opini WTP yang sama. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam kesempatannya menyampaikan rasa banggannya atas capaian itu. WTP yang telah diraih secara berturut turut menandakan integritas, kredibilitas dan akuntabilitas kerja telah meningkat dan semakin membaik. "Atas penghargaan ini, saya berharap akan semakin memacu seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk bekerja yang lebih baik sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku, serta menindaklanjuti beberapa catatan yang direkomendasikan oleh BPK," tandasnya. **(adv/ayu)**

Edisi : Senin, 5 Juni 2017

Hal : 18

HARIAN UMUM
NusaBali

Setelah Buleleng Raih WTP Tiga Kali Beruntun

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng untuk ketiga kalinya secara beruntun meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP tersebut masing-masing atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016. Pasca raih WTP ketiga, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berharap ada kenaikan dana intensifikasi daerah atau dana Rakca sebagai reward, seperti tahun

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

IST

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (kiri) terima LHP berisi WTP dari Ketua BKP Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo, di Denpasar, Jumat (2/6).

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

lalu.

Opini WTP untuk Pemkab Buleleng diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, kepada Bupati Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6) pagi. Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan predikat WTP untuk Pemkab Badung, Pemkab Tabanan, Pemkab Jembrana, Pemkab Bangli, Pemkab Klungkung, Pemkab Karangasem, dan Pemkot Denpasar.

Bupati Agus Suradnyana menyebutkan, secara kualitas, opini WTP yang diraih Pemkab Buleleng kali ini lebih baik dibanding tahun lalu. Pasalnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2016 oleh BPK kali ini tidak berisi kesalahan administrasi. Yang ada hanya berisi catatan tentang perbaikan administrasi. "Secara kualitas, tahun ini lebih baik. Hanya ada delapan catatan perbaikan, bukan kesalahan," tandas Bupati Agus Suradnyana di Singaraja, Minggu (4/6).

Agus Suradnyana berharap dengan torehan hasil WTP terbaik kali ini, pemerintah pusat akan memberikan reward berupa dana intensifikasi daerah kepada Buleleng yang lebih besar dibanding setahun lalu. Kendati tidak serta merta acuannya opini WTP, namun secara perencanaan, ketepatan waktu penyerahan APBD, pertanggungjawaban, dan kinerja aparatur sudah sesuai dengan ketentuan dan sangat mendukung.

Setahun lalu, Pemkab Buleleng menerima dana intensifikasi daerah sebesar Rp 55 miliar dari pusat, setelah menduduki peringkat 10 besar se-Indonesia dalam pengelolan keuangan terbaik. "Saya berharap kita bisa mendapatkan penghargaan dana raksa atau dana intensifikasi deaerah ini," kata Agus Suradnyana.

"Kalau bisa lima besar, kita bisa dapat Rp 65 miliar. Tentu dana ini nanti bisa menambah kemampuan fiscal daerah, untuk mempercepat pembangunan di Buleleng," lanjut politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng 2015-2020 ini.

Menurut Agus Suradnyana, capaian hasil opini WTP dalam pengelolaan keuangan tidak bisa lepas dari hasil kerja keras bersama aparatur sipil negara (ASN). Mereka telah bekerja dengan maksimal. "Saya berterimakasih kepada rekan-rekan aparatur di Pemkab Buleleng, karena sudah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan dengan opini WTP ini, kita bisa kembali mendapat dana intensifikasi daerah dari pemerintah pusat," papar Bupati Buleleng yang mantan Ketua Komisi III DPRD Bali (membidangi pembangunan, infrastruktur, lingkungan) tiga kali periode ini.

Untuk diketahui, berkat pengelolaan keuangan yang taat prosedur dan aturan, Pemkab Buleleng setahun lalu meraih Anugerah Dana Raksa dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 55 miliar. Anugerah Dana Raksa tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Bupati Buleleng yang dijabat Plt I Made Gunaja di Istana Negara Jakarta, 7 Desember 2016.

Anugerah Dana Raksa diberaikan karena Buleleng dinilai profesional dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Anugerah Dana Raksa ini juga merupakan penghargaan tertinggi tingkat nasional. Karena penghargaan ini diberikan kepada 38 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, termasuk di dalamnya Pemkab Buleleng dan Pemkab Jembrana. @ k19

Edisi : Senin, 5 Juni 2017
Hal : 1 dan 5